

JOGJA DARURAT SAMPAH

Kumpulan tulisan peserta
Fellowship WALHI Yogyakarta



JOGJA DARURAT SAMPAH

Kumpulan tulisan peserta
Fellowship WALHI Yogyakarta

Penulis:

Michelle Gabriela Momole
Triyo Handoko
Anugerah Ayu Sendari
M. Hasbi Kamil
Ade Dani

Editor:

Bambang Muryanto

Layout & Cover:

Aziz Anshari

WALHI Yogyakarta

Email : yogyakarta@walhi.or.id

Whatsaap : (+62) 881-2758-593

Instagram : [@pulihkanjogja](https://www.instagram.com/pulihkanjogja)

Website : walhijogja.or.id

Alamat : Wonocatur, Banguntapan, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

DARURAH
HAQMA2



DAKUKA
HAQMA2

Daftar Isi

Pengantar	II
Sepah Pemerintah Ditadah Bank Sampah	3
Meneropong Pengelolaan Sampah di Lokasi Wisata Jogja	22
Jogja Darurat Sampah: Gunung Sampah Hiasi Kota, Bencana di Depan Mata	32
Jogja Darurat Sampah: Setelah Gunung Sampah, Terbitlah Polusi Udara	41
Jogja Darurat Sampah: Hanyut Jauh Sampai Laut, Sampah Rusak Ekosistem	52
Jogja Darurat Sampah: Pemerintah dan Masyarakat Harus Ubah Perilaku	62
Kedai Kopi Menjamur, Sampah Plastik Makin Menumpuk di Yogyakarta	72
Kisah Pak Kas, Pengambil Sampah dalam Pusaran Sengkarut Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta	84
Profil Penulis	

Sepah Pemerintah Ditadah Bank Sampah

Michelle Gabriela Momole



Dipublikasikan di Balairung Press
pada tanggal 18 November 2023



Michelle/Balairung Press

Di tengah kucuran dana fantastis untuk kebudayaan, Kota Yogyakarta punya segudang masalah mengenai sampah. Dari tahun ke tahun, pekerjaan rumah tersebut tak kunjung usai. Kini, bank sampah yang berusaha menyelesaikannya, meski harus bertarung secara mandiri.

Wiwid selalu bersemangat menemui siapa pun yang ingin tahu mengenai pengelolaan sampah. Dengan ramah, perempuan bernama lengkap Tri Wijayati ini selalu menyambut mereka yang datang. Pertanyaan-pertanyaan soal pengolahan sampah dijawabnya dengan lugas. Kendati tampak bersemangat, raut wajahnya tak bisa bohong. Ternyata, ia sudah lelah. Sedari pagi, Wiwid telah sibuk mengajar tentang pengelolaan sampah di SMPN 7 Kota Yogyakarta.

Wiwid memang aktif melakukan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah ke beberapa bank sampah binaannya dan sekolah-sekolah. Ia sendiri terdaftar sebagai pengurus di Bank Sampah Berseri 35, RW 8, Kampung Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Aktivitas sehari-harinya tak pernah lepas dari sampah. “Ya, kalau lagi gak ada penimbangan atau pelatihan, saya ngurusin maggot,” ucapnya.



Wiwid sedang mengurus maggot. ©Michelle/Balairung Press

Wiwid sebenarnya juga seorang pedagang. Akan tetapi, kesibukan mengurus sampah menyebabkan ia tak punya waktu mengurus dagangannya. “Kalau ngurusin sampah kayak gini, dah ga sempet ngurusin yang lain,” ucapnya.

Perjalanan Wiwid bersama Bank Sampah Berseri terhitung cukup lama. Awalnya, Berseri berdiri dalam lingkup RW pada 2015. Kelahirannya bersamaan dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta yang saat itu sedang gencar-gencarnya mengimbau pendirian bank sampah. Sayangnya, umur Berseri tidak bertahan lama. Berseri terpaksa vakum pada 2017 lalu. “Ya, warga malas kalau harus bawa sampah jauh-jauh ke Balai RW untuk ditimbang,” imbuh Wiwid.

Tahun 2019, warga kembali menggagas bank sampah yang lingkungannya diperkecil menjadi tingkat RT. Namanya berubah menjadi Bank Sampah Berseri 35 dan bisa berkembang pesat. Akan tetapi, jalannya tidak mudah. Kendala finansial menjadi biang masalahnya. Wiwid sempat dimonitoring oleh DLH Kota Yogyakarta untuk bikin kegiatan Losida (lodong sisa dapur).

“Tapi saya bingung uangnya dari mana?” ucap Wiwid.

Saat itu, Berseri 35 memang tak memiliki uang sepeser pun. Alhasil Wiwid harus memutar otak untuk mendapat modal. Jelas saja, membuat kegiatan losida di tiap rumah warga memerlukan dana. Sayangnya, DLH Kota Yogyakarta yang

mendorong pengolahan sampah tak memberi dana sepeserpun.

Beruntung, saat itu ada seorang warga RT 35 yang bekerja sebagai Dosen D3 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Ia adalah Desi Susilawati. Melalui Program Pengabdian Masyarakat di tempatnya mengajar, Desi mengarahkan hibah tersebut untuk pelatihan Losida di Bank Sampah Berseri 35. “Ngapain saya pengabdian jauh-jauh, mending hibah pengabdian itu untuk masyarakat di sini,” ucapnya dengan bangga.



Wiwid sedang berjalan menuju kandang maggot. ©Michelle/Balairung Press

Mulai dari hibah pertama itulah, tiap tahun, Berseri 35 selalu bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat UMY untuk mengadakan pelatihan pengelolaan

sampah. Sekarang di sepanjang jalan setapak RW 35 pasti memiliki losida dan ember tumpuk untuk mengolah sampah sisa dapur. “Itu bertahap tiap tahun. Tahun pertama kita pelatihan Losida dan stroberi. Tahun kedua kita pelatihan ember tumpuk dan pengolahan sampah anorganik,” sambung Wiwid.

Berseri 35 memang aktif mengadakan pelatihan pengolahan sampah bagi masyarakat setempat. Pengetahuan mengenai pengelolaan sampah didapat dari pelatihan-pelatihan tersebut. Setiap mengadakan pelatihan, Berseri 35 menggunakan uang kas hasil penimbangan sampah di bank sampah. “Kami juga ngasih amplop untuk warga yang datang pelatihan,” ujar Wiwid.

Jika dihitung, tiap kali mengadakan pelatihan, Berseri 35 harus merogoh kocek sekitar 5 juta rupiah. Sayangnya, tak sedikit pun bantuan dari pemerintah yang mereka terima. “Kami gak pernah menerima bantuan dana dan operasional dari pemerintah,” ucap Wiwid. Pun, jika Berseri 35 menerima dana, itu hasil dari menang lomba.

Dulu bangunan bank sampah yang Berseri 35 gunakan adalah pos ronda. Kemudian, pos ronda tersebut diperbaiki dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar PAUD. Sekarang, kegiatan penimbangan sampah dilakukan di Balai RT. Walaupun begitu, display hasil pengelolaan sampah tetap ditaruh di pos ronda sebelumnya.



Display tas yang terbuat dari sampah anorganik oleh Rumah Kreasi Berseri 35. ©Michelle/Balairung Press

Berseri 35 memang menjadi bank sampah yang berkembang. Namun, prosesnya tidak mudah. Kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah dibangun dengan membentuk koperasi simpan pinjam. Desi mengatakan masyarakat yang menimbang sampah bisa menjadi anggota koperasi. “Dana awal koperasi itu ya kami dapat dari hibah pengabdian juga,” ujar Desi.

Seluruh masyarakat RW 35 kini telah menjadi nasabah dari bank sampah. Bahkan, Berseri 35 juga memiliki rumah kreasi pengolahan sampah anorganik. Tiap warga yang membuat kreasi dari sampah anorganik dihargai dengan poin dan sisa hasil usaha. “Nanti poin itu ditukarkan di akhir tahun dengan sembako,” jelas Wiwid.

Sayangnya, tidak semua bank sampah di Yogyakarta bernasib baik seperti Berseri 35 yang punya kesempatan mendapat dana hibah penelitian dan menang lomba.

Nasib baik tersebut tidak dirasakan Bank Sampah Ngrejeken, RW 11, Kelurahan Pakuncen, Kemantren Wirobrajan. Terletak tepat di belakang Jogja National Museum, Ngrejeken hanya mengandalkan pinjaman timbangan dari posyandu dan pelapak. Haryati, salah seorang pengurus Bank Sampah Ngrejeken, menceritakan keinginannya untuk mengikuti lomba bank sampah agar bisa membantu kas Ngrejeken. Sayangnya, harapan itu pupus.

“Katanya karena kami ga punya tempat khusus penimbangan,” resah Haryati.



Haryati, pejuang Bank Sampah Ngrejeken. ©Vigo/Balairung Press

Akibat tak adanya tempat khusus penimbangan, Ngrejekeni harus menerima keputusan DLH Kota Yogyakarta yang tidak meloloskannya dalam tahap verifikasi. Haryati, tiap bulan, memang selalu minta izin kepada pemilik lahan kosong di dekat rumahnya sebagai tempat untuk menimbang sampah. “Jadi waktu penimbangan, warga bawa sampahnya ke tempat itu,” jelasnya.

Sejak berdiri pada 2020, Ngrejekeni hanya menerima bantuan timbangan digital kecil dan karung pemilahan sampah dari DLH Kota Yogyakarta. Namun, timbangan itu tak berguna karena tak mampu menimbang sampah warga yang jumlahnya berkuintal-kuintal. Ditambah, minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pengelolaan sampah membuat Ngrejekeni berjalan tertatih. “Sosialisasi selama ini cuma keterangan-keterangan saja, paling pol buat sabun,” ujar Haryati.

Hingga kini, masyarakat tempat tinggal Haryati belum mampu mengelola sampah dengan maksimal, khususnya sampah organik. Sementara sampah anorganik, saat ini baru bisa dipilah dan langsung disetorkan kepada bank sampah. Keterbatasan biaya membuat Ngrejekeni hanya berharap pada pelatihan DLH Kota Yogyakarta. “Kami tuh sebenarnya mau belajar bikin lampion, tapi ga ada yang bisa ngajarin. Kalau cuma lihat YouTube ga ngerti,” sambung Haryati.

Kondisi ini tak lantas menyurutkan semangat Haryati. Ia

tetap berusaha mengembangkan Ngrejekeni. “Sekarang saya baru ada alat untuk membuat biopori mandiri, itu juga baru saya sendiri yang punya,” ucap Haryati.

Nasabah Ngrejekeni mencapai sekitar 60 orang. Berbekal timbangan dan meja pinjaman dari posyandu, mereka aktif menimbang satu bulan sekali. Saat ini, Haryati sedang berusaha mencari pengepul lain, lantaran pengepul sebelumnya rendet (lambat) mentransfer uang hasil penjualan sampah. “Kita susah buat cari pengepul lain yang mau langsung ambil barang. Kalau bank sampah lain kan sampahnya bisa diinapkan baru diambil,” sambungnya.

Haryati punya mimpi memiliki tempat khusus untuk menyimpan dan menimbang sampah. Harapannya mengikuti lomba bank sampah demi mendukung kas Ngrejekeni sudah pupus sebelum bertarung. “Saya mah gak ngarep lah! Syukur-syukur kalau dapet dana, enggak juga gapapa. Kami tetap bergerak dari bawah kok!” tegasnya.

Terus Mendesak, Minim Apresiasi

Bank sampah sendiri merupakan buah dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui Bank Sampah. Peraturan ini menggariskan gubernur atau bupati/walikota diamanatkan melakukan pendampingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada bank sampah.

Dilansir dari antaranews.com, Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar, mengatakan bahwa bank sampah menjadi salah satu kunci penting tumbuhnya ekonomi sirkular yang berkelanjutan di Indonesia. “Bank sampah juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan ketersediaan bahan baku industri daur ulang kita,” ucapnya dalam konferensi pers Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, November 2021 lalu.

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta, Christina Endang atau lin, pun menuturkan bahwa pengolahan sampah di bank sampah dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, bank sampah juga ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Walaupun, pembentukan bank sampah, menurut lin, tidak didanai. Akan tetapi pihaknya menyatakan siap melakukan pendampingan bagi bank sampah. “Harapannya sih masyarakat bisa mengembangkannya sendiri,” kata lin.

lin membantah keterangan Haryati terkait syarat administrasi perlombaan bank sampah. Menurutnya, untuk mengikuti lomba bank sampah yang diadakan oleh DLH Kota Yogyakarta tidak perlu memiliki bangunan untuk menampung sampah. “Oh, kami tidak ada indikator harus ada bangunan kok. Yang penting ada plangnya aja,” jelasnya.

Tahun 2022 lalu, DLH Kota Yogyakarta membentuk Forum

Bank Sampah (FBS) Kota Yogyakarta sebagai ruang komunikasi dan sosialisasi pengelolaan sampah. FBS Kota Yogyakarta sendiri bukan forum pertama yang mengayomi para “penggiat sampah”. Sebelumnya, sudah ada forum-forum atau paguyuban bank sampah di sekitaran Kota Yogyakarta.

Melalui FBS Kota Yogyakarta, DLH Kota Yogyakarta menunjuk koordinator bank sampah di tingkat kemantren untuk mengoordinir tiap kelurahan di bawahnya. Lalu, ada fasilitator kelurahan (faskel) di tiap kelurahan untuk mendampingi bank sampah tingkat RW. Feriyanti, salah seorang faskel, menceritakan pengalamannya.

Feriyanti diberi tanggung jawab memberikan pendampingan kepada bank sampah di Kelurahan Pakuncen. Bahkan, sejak Januari 2023, ia diberi target membentuk minimal satu bank sampah di tiap RW. Namun, aktivitasnya mendampingi bank sampah tak mudah. Terlebih, selama ini ia belum pernah mendapat bantuan dari DLH Kota Yogyakarta, baik untuk pendirian, sosialisasi, maupun operasional bank sampah.

“Saya cuma dapat honor Rp250.000, itu belum dipotong pajak,” kata Feriyanti.

Untuk mengadakan sosialisasi bank sampah di kelurahannya, Feriyanti harus menumpang ke aktivitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tiap RW. Sebab, mengum-

pulkan warga harus memiliki dananya, sedangkan ia sama sekali tidak diberi dana untuk melakukan kegiatan. “Ya, kerja-kerja kayak gini lebih banyak tomboknya daripada untungnya,” ujar Feriyanti.

Januari 2023, seiring dengan dorongan pembentukan bank sampah secara masif, DLH Kota Yogyakarta menjanjikan fasilitas pokok kepada bank sampah, seperti buku tabungan dan timbangan. Namun, janji itu tak kunjung direalisasikan. Feriyanti pernah meminta bantuan buku tabungan kepada DLH Kota Yogyakarta.

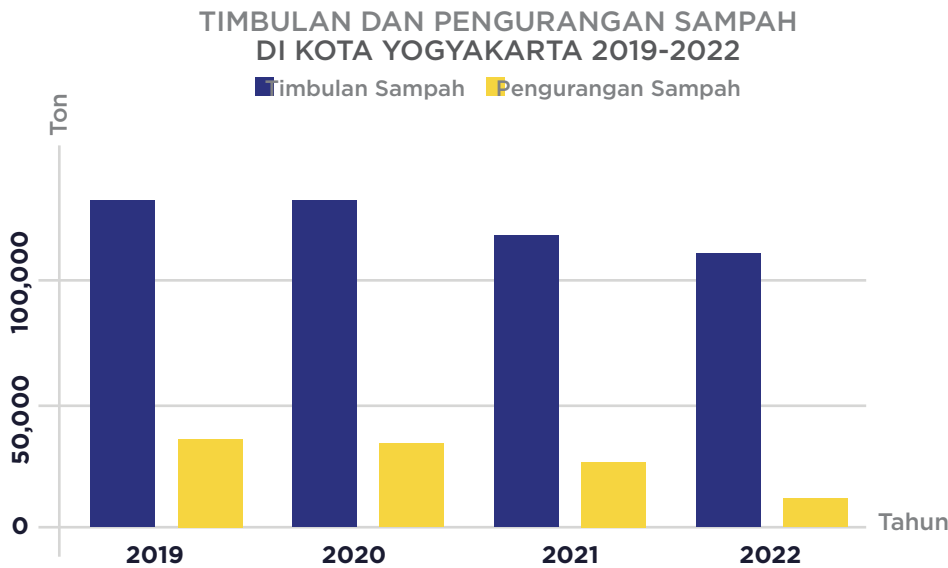
“Saya minta buku tabungan aja sampai sekarang gak dikasih-kasih, katanya nunggu kalau ada bank sampah baru lagi, biar sekalian. Tapi kan, kalau gitu terus gak jadi-jadi to,” jelas Feriyanti.

Padahal, bagi Feriyanti, bank sampah merupakan ujung tombak pemilahan sampah di masyarakat dan memiliki nilai ekonomi sirkular bagi masyarakat. Menurut data dari DLH Kota Yogyakarta, bank sampah telah mereduksi sekitar 5 ton sampah tiap harinya. Tapi, sayangnya, perhatian terhadap bank sampah masih sangat minim. “Seharusnya DLH momong bank sampah. Kita dah mendirikan susah-susah, buatkan SK, tapi kalau gak di-momong ya sia-sia,” ucap Feriyanti.

Rencananya, DLHK Yogyakarta merencanakan studi banding ke Bandung bagi faskel pada November 2023. Bagi Feri-

yanti, dana studi banding ini seharusnya dimanfaatkan untuk memberi fasilitas kepada bank sampah saja, apalagi Yogyakarta sedang menghadapi darurat sampah setelah TPA Piyungan ditutup.

Lagi-lagi, Masyarakat Salah Lagi!



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Sejak 2020, jumlah bank sampah di Kota Yogyakarta terus meningkat. Hasil monitoring per Agustus 2023, terdapat 658 di 14 kemantren dan 28 di antaranya tidak aktif. Sayangnya, beberapa bank sampah yang terdaftar aktif tidak ditemukan lokasinya. Sebut saja Bank Sampah BCL yang terletak di RW 02, Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, yang warga sekitar bahkan tidak mengetahui kehadiran bank sampah tersebut. Nasib serupa juga dialami ketika mencari Bank Sampah Melati RW 03.

Peningkatan jumlah bank sampah di Kota Yogyakarta ini nyataanya tak diikuti dengan kenaikan alokasi dana untuk pengelolaan bank sampah. Menurut data Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta, alokasi dana pengolahan bank sampah periode 2022 hanya Rp1.047.870.00. Kemudian, pada 2023 menjadi Rp1.501.815.500. Alokasi dana ini difokuskan untuk kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan.

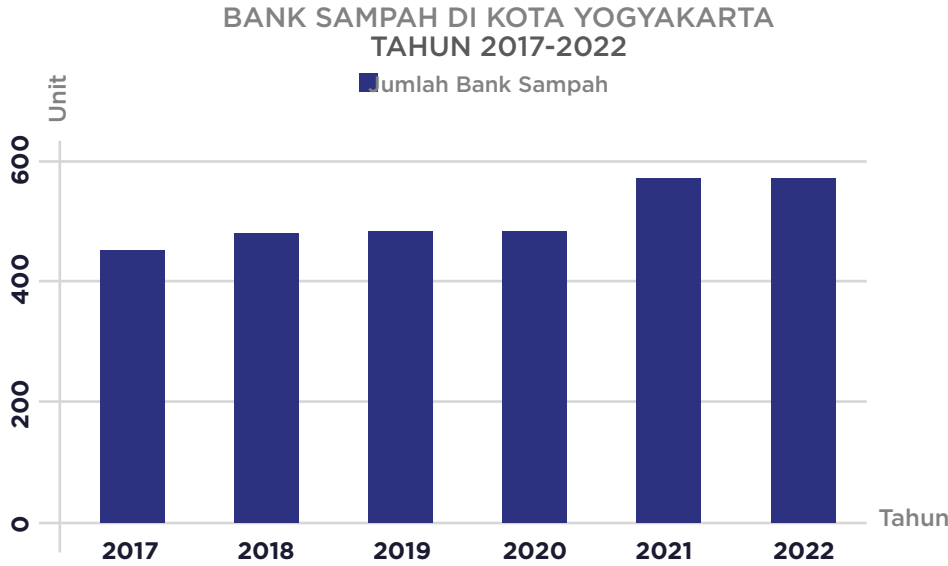
Tabel 1. Alokasi Dana Pengelolaan Bank Sampah 2023

Kegiatan	Target	Anggaran
Pelatihan Keter Bank Sampah	50 Bank Sampah	Rp12.800.000,00
Workshop Forum Bank Sampah Kota	160 orang	Rp41.000.000,00
FGD Forum/Paguyuban Bank Sampah	55 orang	Rp45.000.000,00
Pembekalan fasilitator Kelurahan Pengola Sampah Mandiri	125 Fasilitator Kelurahan	Rp0.000.000,00
Pendampingan Bank Sampah	675 Bank Sampah	Rp17.040.000,00
Sesi-sesi Forum Bank Sampah	60 Forum Bank Sampah	Rp00.000.000,00
Workshop Paguyuban Bank Sampah Kota	40 Forum Bank Sampah	Rp0.100.000,00
Pemanfaatan Kumpung Bussas Sampah	45 Kelurahan	Rp05.875.000,00
Monitoring Bank Sampah	655 Bank Sampah	Rp06.725.000,00
Koordinasi Forum Bank Sampah	35 orang x 20 hari	Rp03.800.000,00
Total		Rp1.501.815.500,00

Sumber: Inventarisasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup, 2023.

Besaran dana untuk pengelolaan sampah ini sangat tak sebanding dengan alokasi pemerintah Kota Yogyakarta untuk urusan kebudayaan. Pada 2022, alokasi dana Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Program Penyelenggaraan

Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan mencapai Rp13.277.000.000 yang diambil dari Dana Keistimewaan DIY.



Sumber: Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Di tengah kucuran dana yang fantastik untuk urusan kebudayaan, Kota Yogyakarta menghasilkan rata-rata timbulan sampah mencapai 123.000 ton per tahun selama 2019-2020. Sedangkan, Pemerintah Kota Yogyakarta hanya mampu mengurangi sekira 21,8% per tahunnya. Ribuan ton sampah yang tidak terpilah itu akhirnya bermuara di TPA Piyungan. Tak heran, jika beberapa waktu lalu, ia tutup. Pasalnya, tak lagi mampu menampung muntahan dari truk-truk pengangkut sampah.

lin mengatakan produksi sampah di Kota Yogyakarta mencapai 336 ton per hari. “Mayoritas dari 336 ton timbunan sampah itu berasal dari rumah tangga, dari warga,” ucap lin.

Tak lama kemudian, ketika dimintai keterangan lebih lanjut, lin mengatakan sampah rumah tangga juga berasal dari institusi, kos-kosan, lembaga, dan pariwisata. “Pariwisata juga turut menyumbang sampah. Kalau warga dalam kampung kan jumlahnya cukup terkendali,” sambungnya.

Menurut Nurul Agustina, Staf Bagian Pengelolaan Sampah DLH Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi DIY sedang menyiapkan lahan transisi baru di TPA Piyungan. Lahan itu akan dikelola dengan sistem sanitary landfill, sampah dikumpulkan di cekungan tanah. Ia menambahkan bahwa TPA Piyungan seharusnya hanya menjadi tempat pembuangan residu sampah. Akan tetapi karena minimnya pemilahan sampah, semua sampah bermuara di sana. “Pemilahan sampah di masyarakat ini masih cukup sulit untuk dilakukan,” sambungnya lirih.

Minimnya Komitmen Mengolah Sampah

Joko, pendiri Bank Sampah Lintas Winongo RW 11, Kampung Bumijo, Kemantren Jetis, mempunyai pengalaman lama mengelola bank sampah. Ia telah mendirikan bank sampah sejak 2008 ketika dirinya menjabat sebagai Ketua RW. Tanpa arahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan DLH Kota Yogyakarta, ia mengajak warga mengolah sampah mereka.

“Dulu saya ga tau ada peraturan atau undang-undang tentang bank sampah. Saya cuma risih lihat sampah menumpuk

di tong-tong itu, padahal kan kalau dijual ada uangnya,” ujar Joko.



*Joko sedang menunjukkan alat pengurai sampah organik, yakni biopori.
©Michelle/Balairung Press*

“Dulu saya ga tau ada peraturan atau undang-undang tentang bank sampah. Saya cuma risih lihat sampah menumpuk di tong-tong itu, padahal kan kalau dijual ada uangnya,” ujar Joko.

Mulai dari sana, warga tertarik memilah sampah, khususnya ibu-ibu PKK. Bank Sampah Lintas Winongo diresmikan pada 2009. Waktu itu namanya belum bank sampah, tapi pengelolaan sampah. Peresmian Lintas Winongo dihadiri oleh para pejabat mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Ia mendapat berbagai apresiasi dari langkah beraninya itu.

Sampai sekarang, Lintas Winongo menjadi salah satu bank

sampah pembina yang aktif melakukan penimbangan tiap minggunya. Namun, Joko kadang menyesalkan persoalan sampah di Yogyakarta yang tiada akhirnya. “Darurat sampah itu bukan kali ini aja, sebelumnya sudah beberapa kali terjadi,” ucap Joko.

Ia berpendapat bahwa peningkatan jumlah bank sampah dan kesadaran masyarakat mengelola sampah di tiap RW, seharusnya bisa menyelesaikan persoalan sampah di Yogyakarta. Pasalnya, sampah anorganik sudah bisa dikelola oleh warga. Namun, sayangnya, kesadaran masyarakat itu tidak diimbangi dengan komitmen dari Pemerintah Kota Yogyakarta. “Pemerintah daerah ini tidak punya komitmen kuat dalam menyelesaikan masalah sampah,” ucapnya.

Joko mengatakan bila Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen kuat, masalah sampah tidak akan berlarut-larut. Lagipula, menurutnya, Yogyakarta sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan budaya, seharusnya memberi perhatian khusus pada pengelolaan sampah.

Minimnya komitmen ini juga berimbas pada terlampau kecilnya anggaran pengelolaan bank sampah. Nasib bank sampah yang didirikan Joko sama dengan bank sampah lainnya yang tidak pernah menerima bantuan dana. “Ya masyarakat mau tidak mau harus swadaya untuk mengolah sampah,” ucapnya.

Masalah sampah di Yogyakarta seharusnya bisa disele-

saikan bila pemerintah memang memprioritaskan pengelolaan sampah. Dalam pandangan Joko, daripada membuat lokasi baru untuk menumpuk sampah, lebih baik dananya digunakan untuk membuat teknologi pengolahan sampah secara masif. “Dari dulu sudah ada penelitian buat alat pengolahan sampah, tapi sampai sekarang saya gak tau bentuknya gimana?”

Meneropong Pengelolaan Sampah di Lokasi Wisata Jogja

Triyo Handoko



Dipublikasikan di Harian Jogja
pada tanggal 08 Maret 2024



Handoko/ Harian Jogja

Tidak semua tempat wisata di Jogja dikelola sampahnya.

Di ujung sisi utara Jalan Margo Utomo, Kota Jogja penuh dengan wisatawan, beberapa waktu lalu. Mereka berdiri di sekitar miniatur Sumbu Filosofi yang berada tepat di sisi

tenggara Tugu Jogja. Sebagian tampak mengantre untuk menyeberang jalan menuju ke Tugu Jogja.

Selain di sekitar Tugu Jogja, para wisatawan dan warga Jogja juga suka mencari angin di sepanjang Jalan Margo Utomo. Sayangnya, di sepanjang jalan satu arah dari Tugu Jogja hingga perlintasan kereta api di ujung utara Malioboro itu tidak tersedia banyak tempat sampah. Di sebelah timur laut miniatur Sumbu Filosofi, terdapat tiga tempat sampah dengan warna merah, kuning, dan hijau yang saling berdempetan.

Warna tempat sampah yang berbeda menandakan jenis sampah yang ditampung. Warna hijau untuk sampah organik, tetapi justru lebih banyak berisi sampah plastik. Begitu juga warna kuning untuk sampah anorganik, justru berisi aneka jenis sampah organik, terutama sampah makanan. Sedangkan warna merah untuk menampung sampah berbahaya, tetapi berisi bungkus rokok.

Eljoint Henri Situmorang tampak mondar-mandir di sekitar Tugu Jogja. Pria yang mengenakan kaus lengan panjang warna oren dengan tulisan UPT Malioboro pada bagian punggung itu adalah Koordinator Lapangan Kebersihan untuk wilayah Jalan Margo Utomo. Ia bersama delapan orang teman kerjanya sudah membersihkan Jalan Margo Utomo sepanjang hampir 1 kilometer itu sejak pukul 14.00 WIB.

“Ada dua tim untuk dua sif. Total ada 17 orang petugas kebersihan di Jalan Margo Utomo ini, semuanya memastikan agar tak ada sampah yang tercecer,” ungkapnya.

Berbekal sapu, kantong sampah, dan perlengkapan lain, para petugas kebersihan ini mengangkut semua sampah di salah satu kawasan Sumbu Filosofi itu. Semua sampah yang terkumpul dimasukan ke dalam kantong sampah lalu diangkut ke kantor UPT Malioboro.

“Semua hasil pembersihan ini, kami campur dulu, lalu setelah diangkut ke UPT Malioboro baru dilakukan pemilahan. Sampah organik dikelola dengan biopori di Teras Malioboro 2, sedangkan sampah anorganik masih dipilah berdasarkan jenisnya dan dirongsokan,” terangnya.

Setiap sif pembersihan sampah di Jalan Margo Utomo rata-rata bisa mengumpulkan 15 kantong sampah. Tetapi jika banyak wisatawan seperti saat liburan panjang, mereka bisa mengumpulkan hingga 25 kantong sampah.

Di kawasan Malioboro yang jadi “jantung” wisata di Jogja, volume sampah dari wisatawan lebih banyak lagi. Di Malioboro, jumlah petugas kebersihan juga lebih banyak, total ada 30 orang yang dibagi dalam tiga sif. Sekali sif, petugas kebersihan bisa menumpulkan rata-rata 45 kantong sampah.

Pagi itu, adzan subuh baru berkumandang saat Muhammad Fajar Nugroho sedang menyapu di kawasan Malioboro. Bersama sembilan rekan kerjanya, ia menyisir setiap sudut di kawasan itu untuk memastikan tidak ada sampah yang tertinggal.

“Wah kalau di Malioboro itu 24 jam petugas kebersihannya, dari jam 04.00-11.00 itu sif pertama, sif kedua 12.00-19.00, masih disambung lagi shift berikutnya jam 20.00 - 02.00 WIB,” rincinya.

Fajar sudah bekerja sejak tiga tahun yang lalu. Tidak boleh ada tumpukan sampah di Malioboro seperti di ruas jalan lainnya di kawasan kota.

“Harus diambil, entah nanti seperti apa mengelola atau membuangnya,” terangnya.

Berbeda dengan Jalan Margo Utomo yang nihil tempat sampah, di Malioboro ada tempat sampah tiap 10 meter yang berjejer rapi baik di sisi barat dan timur Malioboro. Menurut Fajar, jumlahnya ada sekira 120 unit yang selalu diganti jika ada yang rusak.

Tidak ada perbedaan untuk jenis sampahnya, semuanya berwarna krem.

Pemilahan Sampah Malioboro

Tak jauh dari Stasiun Kereta Api Lempuyangan, terdapat bangunan seluas 500 meter persegi yang menjadi lokasi pengelolaan sampah asal kawasan Tugu Jogja hingga Alun-alun Utara. Tempat itu adalah Kantor Unit Pengelola Teknis (UPT) Malioboro yang bertanggung jawab memilah sampah dari kawasan utama pariwisata Jogja itu sejak Oktober 2022.

Bagian depan kantor berfungsi sebagai ruang administratif, sedangkan di bagian belakang ada gudang besar yang beralih fungsi jadi tempat pengelola sampah. Semula gudang itu untuk menyimpan alat-alat perlengkapan yang diubah menjadi tempat pengelolaan sampah sejak Oktober 2022. “Ada pemilahan, biopori, dan kolam lele untuk menghabiskan sampah organik,” kata Kepala UPT Malioboro, Ekwanto.

Ia menceritakan mulanya hanya pemilahan lalu berkembang hingga pembuatan sampah organik. Yang anorganik dijual ke rekanan pengepul sedangkan sampah residu yang tidak terolah dikoordinasikan dengan DLH.

UPT Malioboro sudah melebarkan pengelolaan sampahnya hingga ke Teras Malioboro 2 dengan membuat empat biopori berkapasitas lima meter persegi tapi tak bisa diperluas lagi. Ekwanto mengatakan sejauh ini masih bisa menam-

pung sampah yang ada tapi ke depan jika semakin banyak tentu perlu siasat lain.

Tak Dipilah

Setiap malam, Alun-alun Selatan yang berada di belakang Keraton Yogyakarta itu seperti pasar malam. Ada *odong-odong* yang gemerlap dan beragam makanan yang disajikan para pedagang.

Pada Mei 2023 lalu saat Jogja menghadapi darurat sampah karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan ditutup, muncul tumpukan sampah di Alun-alun Selatan. Seminggu tak terangkut, paguyuban pengelola Alun-alun Selatan kebingungan. Meski sudah ditutup terpal agar tak terlihat wisatawan, bau tak enak yang menguar tidak bisa disembunyikan. Akibatnya kunjungan wisatawan jadi menurun.

Atmo, 78, salah satu pedagang kaki lima di Alun-alun Selatan memutuskan tak berjualan saat itu. .

Atmo mengatakan sampah di Alun-alun Selatan tetap tidak dipilah. Ia sendiri hanya menghasilkan satu bungkus plastik yang berisi bungkus sachet kopi, sedangkan sampah jagung diambil orang buat pakan ternak.

Pengurus Kampung Langenastran, Keraton, Supriyanto, 37,

juga mengatakan hal sama. Alasannya, sulit karena keterbatasan petugas. Ada petugas kebersihan dari DLH yang tugasnya hanya menyapu. Kalau lanjut pemilahan, harus bayar orang lain lagi sementara anggaran terbatas dan diprioritaskan untuk membayar jasa pengangkutan.

“Yang terpenting itu terangkut kalau sekarang, kalau tidak diangkut sangat mengganggu sekali,” tegasnya.

Supriyanto mengatakan jika sampah tidak bisa diambil setiap hari maka Alun-alun Selatan jadi kotor dan bisa mengurangi jumlah wisatawan. Untuk menghindari risiko ini, paguyuban berinisiatif mencari pengangkutan mandiri dari swasta yang mengambil sampah tiap pagi sekitar pukul 03.00 WIB.

Kepala Bidang Persampahan DLH Jogja, Ahmad Haryoko mengatakan pihaknya mengaku sudah meminta untuk melakukan pemilahan sampah di Alun-alun Selatan. “Dalam sosialisasi sudah dijelaskan untuk melakukan pemilahan, nanti akan kami koordinasikan lagi,” katanya.

Diberi Pelatihan

Lain lagi dengan kisah dari Kampung Wisata Kali Gajah Wong yang mengelola sampah secara mandiri. Tempat wisata yang menawarkan Bendungan Lapen dan Dermaga Cinta ini bahkan mengelola sampah, mulai dari proses

pemilahan, pengelolaan, hingga penjualan hasil olahan sampah.

Tempat pengelolaan sampah yang berbentuk semi permanen dan terbuka di kampung wisata ini berdiri di pinggir Kali Gajah Wong. Aktivitas pemilahan sampah hingga pembuatan pupuk organik dilakukan di tempat seluas 20 meter persegi. Persis di sampingnya, ada kebun yang dikelola Kampung Wisata Kali Gajah Wong.

“Kami tanam berbagai sayuran dengan menggunakan pupuk dari kompos sampah organik,” kata Ketua Kampung Wisata Kali Gajah Wong, Suwanto sambil menunjuk lubang biopori yang digunakan untuk pengomposan.

Tempat pengolahan sampah lainnya menempati gedung sekolah dasar yang tidak dipakai lagi. Di sini, sampah organik digunakan untuk ternak maggot yang bisa dijual dan untuk pakan lele. Warga juga punya kolam lele yang dikelola bersama.

Suwanto bercerita sampah yang diolah tidak hanya dari para wisatawan tetapi juga yang hanyut melalui Kali Gajah Wong. Saat darurat sampah banyak sampah hanyut yang berasal dari Jogja utara yang mengganggu keindahan Kampung Wisata Kali Gajah Wong. Setelah dipilah, sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual akan ditabung ke Bank Sampah Kelurahan Giwangan.

“Semua ini kami lakukan secara swadaya sejak 2019. Alhamdulillah sekarang mulai dilirik kampus-kampus, terakhir ada bantuan dari Universitas Sanata Dharma,” tuturnya.

Suwarto mengaku dari Dinas Pariwisata (Dispar) Jogja, pihaknya hanya menerima pelatihan yang sebelumnya sudah pernah mereka dapatkan dan sudah dipraktikkan, jadi tak banyak membantu. Sebenarnya ia berharap Dispar Jogja bisa memberikan fasilitasi lebih bagi tempat wisata yang dikunjungi lebih dari 6.000 wisatawan tiap bulan itu. “Kami harap ada fasilitasi berupa alat pengelola sampah yang lebih memadai agar bisa meningkatkan kapasitas kami,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dispar Jogja, Wahyu Hendratmoko mengatakan pihaknya sudah memberikan banyak fasilitas kepada pengelola wisata di wilayahnya. Antara lain fasilitasi pelatihan baik berupa manajerial sampai pengelolaan sampah dan tempat sampah yang bekerja sama dengan DLH.

“Sesuai arahan Penjabat Walikota, kami juga turut menindaklanjuti Gerakan Mbah Dirjo dengan bikin biopori di objek-objek wisata kami,” tandasnya.

Undang-undang- No.18/2008 tentang Pengelolaan

Sampah disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Tanggung jawab itu lantaran pengelolaan sampah masuk dalam layanan publik yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Tak hanya itu, Peraturan Presiden No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dipertegas bahwa pemerintah wajib memberikan sarana prasarana memedahi untuk pengelolaan sampah.

Sementara itu, Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM menilai perlu ada manajemen bersama dan terpusat untuk mengelola sampah dari aktivitas pariwisata. "Tanpa manajemen dan standar yang sama maka penyelesaian masalah sampah tidak efektif," kata Kepala PSLH UGM, Purnomo Hadi.

Hadi tak mempermasalahkan dinas mana yang mengelola sampah di tiap tempat wisata Jogja. Mestinya setiap pihak (dinas) terlibat dan ada perlu manajemen bersama agar tercipta kepaduan dalam menyelesaikan masalah sampah di sektor pariwisata.

"Ini kan soal citra, misal ada satu saja tempat wisata yang gagal mengelola sampahnya, taruhannya seluruh wisata yang ada di Jogja, jangan sampai itu terjadi," tegasnya.

Jogja Darurat Sampah: Gunungan Sampah Hiasi Kota, Bencana di Depan Mata

Anugerah Ayu Sendari



Dipublikasikan di Liputan6.com
pada tanggal 31 Oktober 2023



Ayu Sendari/ Liputan6.com

Seorang pengendara motor matic tampak menepi dengan kantong sampah di dek motornya. Yudi segera meraih dan melemparkan sampah itu ke tengah gunungan sampah di depannya. Tak selang satu menit, datang dua pengendara motor yang melakukan hal sama.

"Dilempar ke tengah, Pak," ujar Yudi seraya menarik kantong sampah agar tidak berada di peinggir jalan.

Pagi itu, Kamis (28/9/2023) adalah hari libur karena bertepatan dengan Maulid Nabi, Depo Sampah Pengok di Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta kembali dibuka. Sehari sebelumnya, depo ini tutup mengikuti aturan pemerintah daerah, tiga hari buka, satu hari tutup.

Baru sehari tutup, sampah sudah membludak, menggunung setinggi hampir 4 meter dan tumpah hingga satu meter ke bahu jalan. Yudi merupakan salah satu penarik gerobak sampah yang membantu mengatasi sampah agar tak meluber ke tengah jalan.

Penjaga Depo Pengkok, Rukijo bersama dua kawannya, Bejo dan Ismail telah menyaksikan "gunungan sampah" di depo yang mereka jaga selama dua bulan terakhir ini. Sebuah gubuk sederhana di seberang depo jadi pos pemantauan mereka.

Setiap hari mereka bekerja bahu-membahu, ada yang mengatur arus lalu lintas, menyerok sampah agar tak tumpah ke jalan, hingga mengumpulkan sampah yang masih punya nilai ekonomi. Bau kecut sampah tak mengusik hidung mereka.

Aktivitas buang sampah di Depo Pengok dari pukul 06.00 hingga 12 siang sering menimbulkan kemacetan karena berada di pinggir jalan yang ramai lalu lintas, terutama pagi hari. Penyebabnya adalah para pengendara motor yang berhenti untuk membuang sampah dan tumpahan sampah hingga ke jalan yang tidak begitu lebar.

"Ini masih belum seberapa, kalau bukan hari libur, sering macet, orang berangkat kerja atau antar sekolah, pasti mampir buang sampah di sini," ujar Rukijo.

Tutupnya TPST Piyungan



Yudi, penarik gerobak sampah membantu melemparkan sampah milik warga yang dibuang di Depo Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta.
©Anugerah Ayu/Liputan6.com

Depo Pengok adalah salah satu tempat pembuangan sampah sementara, sebelum diangkut ke Tempat Pembuan-

gan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Semenjak Piyungan ditutup pada 23 Juli - 5 September 2023 dan diikuti dengan pembatasan pembuangan, para penarik gerobak sampah tak bisa mengambil sampah setiap hari. Alhasil, warga memilih membuang sampah sendiri.

Rukijo mengatakan Depo Pengok mendapat kuota 8 ton sampah untuk dibuang ke TPST Piyungan selama tiga hari. Kuota ini lebih kecil dari volume sampah di Depo Pengok. Akhirnya hanya sampah di bagian depan saja yang terangkut. Sisanya menggunung di depo itu.

"Kalau kita berdiri di atas situ, rasanya ada panas dari bawah, matang sampahnya," ujar Rukijo menunjuk pucuk gunung sampah.

Sampah plastik, sayuran, sisa makanan, bangkai hewan, hingga perkakas rumah tangga, semua campur menjadi satu di depo. Sese kali Rukijo dan kawan-kawannya mengambil botol-botol bekas dan galon sekali pakai dari tumpukan sampah. Hari itu mereka juga menemukan teflon dan sepatu.

"Memang (warga) sudah disarankan memilah, tapi sudah dipilah, sampai sini dicampur lagi, kan percuma. "Harusnya ada fasilitasnya, seperti truk pengangkutnya yang dibedakan," tambahnya.

Permasalahan sampah kembali menghantui warga Yogyakarta sejak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan pada 23 Juli sampai 5 September 2023. Alasannya sudah over kapasitas. Piyungan menampung sampah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DIY (2022) menyebutkan TPST Piyungan memiliki daya tampung hingga 780 ton. Data 2023 mencatat tiap hari volume sampah yang masuk ke TPST Piyungan mencapai 1.231,55 ton. Sementara kapasitas pengolahan hanya 756 ton per hari.

Usai dibuka pada 6 September 2023, TPST Piyungan dibatasi hanya bisa menerima sampah sekira 300 ton per hari. Pembagiannya, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masing-masing mendapat kuota 135 ton dan Kabupaten Bantul, 30 ton.

Pembatasan ini tidak cukup menampung sampah dari Kota Yogyakarta saja. Setiap hari warga lokal dan wisatawan bisa menghasilkan sampah hingga 0,8 kg, sehingga total produksi sampah bisa mencapai sekira 300 ton.

Akibatnya ada “gunungan sampah” di berbagai penjuru kota dan di sejumlah depo, seperti Depo Pengok. Tak

sampai 1 kilometer dari depo ini, ada tumpukan sampah yang dibuang masyarakat secara liar. Padahal di situ ada spanduk larangan dan pasal-pasal sanksinya, tetapi tidak dihiraukan.

Akar persoalan sampah di Provinsi DIY yang menyebabkan TPST Piyungan cepat penuh adalah tidak ada pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Pemerintah juga tidak menyediakan fasilitas yang memadai sehingga masyarakat bisa memilah sampah.

Gas metana penyebab krisis iklim



Suasana TPST Piyungan Kamis (28/9/2023) yang masih ditutup sebagian. ©Anugerah Ayu/Liputan6.com

Sekjen Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI), Yuningtyas Setyawati (Tyas) mengatakan jika tak segera

diatasi, permasalahan sampah di Yogyakarta akan menimbulkan bencana ekologis berkelanjutan. Ia juga menjelaskan model penumpukan sampah yang tidak terpilah di TPST Piyungan itu memendam risiko yang besar.

Sampah yang dibiarkan menumpuk dan menggunung lama kelamaan akan menghasilkan gas metana. Gas ini akan mudah terbakar jika ada pantikan api seperti kebakaran TPA Sarimukti di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahkan bisa meledak seperti tragedi TPA Leuwigajah pada 2005 silam.

"Gas metan itu kalau dibiarkan begitu saja, bisa meledak," ujarnya saat ditemui pada Selasa (26/9/2023).

Selain itu, gas metana (CH_4) adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan krisis iklim. Di atmosfer, gas ini menahan panas matahari yang seharusnya dilepaskan ke luar angkasa. Akibatnya, suhu bumi meningkat dan terjadi pemanasan global, sumber segala bencana.

The Climate and Clean Air Coalition menyatakan metana memiliki dampak pemanasan 86 kali lebih kuat dibandingkan CO_2 . Pada 2021, terjadi peningkatan emisi metana tahunan terbesar sejak pemantauan global dimulai empat dekade lalu. Jumlah metana di atmosfer diperkirakan akan meningkat hingga 13% pada 2030.

Lebih dari 60 persen emisi metana berasal dari aktivitas manusia. Pembusukan sampah organik di tempat pembuangan sampah yang tidak terpilah, menyumbang 20 persen.

Tumpukan sampah di TPST Piyungan juga menghasilkan air lindi yang bisa membanjiri pemukiman warga ketika musim hujan tiba. Pada Desember 2021 misalnya, air lindi setinggi 30 cm menerjang pemukiman di bawahnya. Air lindi juga masuk ke saluran air (sungai) yang airnya masuk ke persawahan.

Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK Provinsi DIY), Aris Prasena mengungkapkan pihaknya sudah memasang pipa-pipa khusus untuk menangkap gas metana dan air lindi tersebut.

"Gas metana itu ditangkap dengan pipa-pipa dan dibakar supaya tidak meledak. Minimal dia tidak terjebak dalam timbunan sampah," ujar Aris, Kamis (21/9/2023).

Sementara itu Tyas menegaskan pemerintah daerah harus bertindak dan memikirkan manajemen sampah yang bagus agar tidak menimbulkan berbagai bencana. Potensi bencana tak hanya terjadi di sekitar TPA, tapi juga di hulu tempat sampah-sampah bermula.

"Pencemaran lingkungan juga terjadi di hulu (masyarakat) karena pembuangan sampah tidak bisa difasilitasi," ujarnya. Akhirnya masyarakat membuang sampah sembarangan atau membakarnya yang bisa menimbulkan bencana ekologis. Polusi udara dan pencemaran lingkungan menjadi bentuk bencana yang kini mulai dirasakan warga Yogyakarta.

Jogja Darurat Sampah: Setelah Gunung Sampah, Terbitlah Polusi Udara

Anugerah Ayu Sendari



Dipublikasikan di Liputan6.com
pada tanggal 31 Oktober 2023



Ayu Sendari/ Liputan6.com

Samar-samar asap membumbung dari tepian Sungai (Kali) Code di Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Sungai yang berhulu di kaki Gunung Merapi ini adalah salah satu sungai besar yang melewati Kota Yogyakarta. Sore itu, rumah milik Marpiyah (35), salah seorang warga di pinggir sungai itu tertutup rapat, Rabu (6/9/2023).

Selama sebulan terakhir, Marpiyah mulai terbiasa dengan asap hasil pembakaran sampah milik warga di lingkungannya. Ia juga ikut membakar sampahnya.

"Semenjak TPST Piyungan tutup sebulan lebih, warga pada bingung mau dikemanain, udah numpuk semua sampahnya. Terus akhirnya, ya udah dibakar aja," ujarnya.

Ia menyebutkan warga biasa membakar sampah saat matahari mulai turun. Sekitar pukul 2 siang hingga petang. Ada juga yang membakar pada malam hari.

Sebagian besar warga di lingkungannya tak punya pilihan selain membakar. Marpiyah sebenarnya merasa terganggu ketika asap pembakaran masuk ke rumahnya. Terlebih, ia memiliki dua anak kecil di rumah. Asap bisa saja mengganggu kesehatan mereka.

"Ya sebenarnya ada asapnya (masuk rumah), tapi mau gimana lagi," ujarnya pasrah.

Ia mengatakan sampah yang dibakar itu sudah dipilah. Sampah anorganik disetor ke bank sampah yang buka sepekan sekali. Sisanya, baru ia titipkan untuk dibakar.

Pada malam hari, kondisi pinggiran Kali Code lebih parah. Titik pembakaran semakin banyak dan asapnya lebih pekat. Tak jauh dari titik pembakaran sampah, sekelompok pria

paruh baya nampak duduk santai dan berbicara di ban-taran sungai menjelang pergantian hari, Selasa (12/9/2023).

Di dekat pembakaran, Bagyo, seorang warga setempat, berdiri mengawasi nyala api sejak pukul 10 malam. Sese kali ia mengorek sampah agar api menyebar. Ia mengatakan sampah yang sudah dipilah milik warga itu mulai padam pada pukul 2 dini hari.

"Ya, ada juga yang tidak terpilah, akhirnya ikut dibakar," ujarnya.

Bagyo butuh sekira satu liter minyak tanah atau bensin untuk membakar sampah dalam sehari. Banyak warga di pinggir Sungai Code yang membakar sampah tiap malam. Ia dan warga berharap kondisi ini tak terus berlangsung lama sehingga tak perlu membakar sampah.

Kebakaran lahan meroket



Pembakaran sampah di malam hari oleh warga sekitar Kali Code Rabu (12/9/2023). ©Anugerah Ayu/Liputan6.com

Aktivitas pembakaran sampah makin meningkat setelah TPST Piyungan ditutup. Bahkan kegiatan ini memicu beberapa kasus kebakaran lahan di Yogyakarta. Data Rekapitulasi Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, Agustus 2023 mencatat ada 7 kasus kebakaran lahan akibat pembakaran sampah di kota.

Sedangkan data UPT Pemadam Kebakaran Sleman mencatat ada 48 kasus kebakaran lahan/sampah selama Agustus 2023. Angka ini naik 756 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 9 kasus. Sementara per 5 September 2023, sudah ada 77 kasus.

"Setelah Piyungan ditutup, kasus kebakaran lahan atau

sampah itu meningkat tajam," ujar Kepala Seksi Operasional dan Investigasi Pemadam Kebakaran Sleman, Murtiyanto.

Ia menegaskan sebagian besar kebakaran lahan karena ulah manusia, seperti pembakaran sampah yang tidak dikendalikan atau ditunggu sampai api mati. Musim kemarau yang panas dan kering ditambah angin kencang makin meningkatkan potensi kebakaran lahan.

"Rekor kemarin (Agustus), 1,5 jam ada 3 kebakaran," ujar Murtiyanto di UPT Pemadam Kebakaran Sleman, Selasa (18/9/2023).

Padahal Agustus setahun lalu, hanya ada satu kejadian kebakaran lahan. Meski begitu, korelasi penutupan Piyungan dan tingkat kejadian kebakaran perlu dikaji lebih dalam karena musim kemarau juga bisa meningkatkan risiko kebakaran.

Bencana kesehatan polusi udara

Aktivitas pembakaran sampah dan kasus kebakaran berpotensi mempengaruhi kualitas udara di Yogyakarta. Berdasarkan pemantauan Laporan Kualitas Udara yang dikeluarkan oleh Nafas Indonesia, Agustus 2023, Yogyakarta menempati peringkat ke-8 sebagai kota berpolusi tertinggi di Indonesia.

Peringkat ini diukur berdasarkan tingkat PM 2.5 yang merupakan partikel padat polusi udara seukuran butiran pasir. Ukuran PM 2.5 sangat kecil sehingga partikel ini tidak dapat disaring tubuh dan bisa menimbulkan masalah kesehatan.

Kadar PM 2.5 di Yogyakarta pada Agustus 2023 mencapai 43. Naik 12 poin dari Juli yang hanya 31. Kadar PM 2.5 yang mencapai 43 termasuk tidak sehat bagi kelompok sensitif. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan udara bersih memiliki konsentrasi PM 2.5 kurang dari 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dalam 24 jam dan 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dalam setahun.

Pakar Pulmonologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Ika Trisnawati, mengatakan pembakaran sampah yang memicu kebakaran lahan adalah salah satu bentuk bencana ekologis. Polutan hasil pembakaran sampah bisa mempengaruhi berbagai gangguan kesehatan dari akut hingga kronis.

"Udara yang dihirup masuk ke paru-paru itu tercampur partikel hasil pembakaran (sampah) yang mengandung racun. Yang paling terdampak itu saluran pernapasan dan paru-paru," ujar Ika, Jumat (15/9/2023).

Dokter spesialis paru dan penyakit dalam ini mengatakan, plastik dan karet merupakan jenis sampah yang paling beracun jika dibakar. Di dalam polutan ini, ada partikulat sangat kecil yang bisa masuk sampai kantong paru-paru

sehingga menyebabkan peradangan dan penyakit.

"Setiap partikulat itu ada sulfat, nitrat, amonia, karbon monoksida, hidrogen, ini semua bisa merusak jaringan atau sel sel saluran pernapasan dan di kantong paru," tambahnya.

Dalam jangka panjang, polutan yang terhirup dapat menyebabkan paru-paru mengalami infeksi akut hingga kronis. Paling parah, jadi penyebab kanker paru-paru. Kondisi ini bisa dialami siapa saja sedangkan untuk kelompok tertentu seperti yang punya komorbid, anak, dan lansia menjadi lebih rentan. Polusi udara juga bisa menyebabkan munculnya penyakit lain, seperti kanker kelenjar getah bening atau kanker darah, gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah.

"Polutan itu sendiri tidak hanya mempengaruhi paru, karena zat-zat toksik itu bisa spill out ke pembuluh darah dan menyebabkan kelainan di organ lain," jelas Ika.

Jika terhirup, partikulat beracun bisa masuk ke pembuluh darah dan berdampak kepada jantung. Zat beracun ini akan menyebabkan pengapuran atau kalsifikasi (penumpukan kalsium) pada arteri (pembuluh darah) sehingga jadi penyebab stroke, hipertensi, dan gangguan jantung.

"Memang yang paling awal kelihatan itu efek akut paru-paru, karena begitu terhirup itu langsung terasa. Tetapi jangka

panjangnya itu bisa ke organ lain, terutama kanker," tambahnya.

Ika menjelaskan, polusi udara juga berpengaruh pada pertumbuhan anak. Anak yang tumbuh di daerah polutan dan nonpolutan memiliki pertumbuhan otak yang berbeda. Polutan bisa menyebabkan attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) atau gangguan pemusatan perhatian yang bisa muncul sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan anak.

"Autis atau ADHD, itu salah satu penyebabnya adalah polutan," tegasnya.

Peningkatan kasus gangguan pernapasan

Ika yang berpraktik di sejumlah rumah sakit di Yogyakarta mengamati ada peningkatan kasus gangguan respirasi selama sebulan terakhir. Namun, ini juga akibat dari puncak musim kemarau, bukan hanya karena pembakaran sampah. "Kemarau panjang juga berisiko menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Tanah yang kering mudah terbawa angin dan terhirup. Itu saja sudah meningkatkan risiko radang saluran pernapasan, apalagi ditambah pembakaran sampah," tegas Ika.

Kenaikan kasus gangguan pernapasan tercatat di fasilitas kesehatan primer. Menurut Dinas Kesehatan Kota Yogya-

karta, per Kamis (21/9/2023) ada peningkatan penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga Illness Like Influenza (ILI) sebesar 40 persen pada Agustus-September 2023 dibanding bulan sebelumnya.

Di Bantul, tren ISPA juga naik. Juli 2023, ISPA mencapai 7.079 kasus, meningkat menjadi 10.300 kasus pada Agustus.

Data Dinas Kesehatan Sleman juga mencatat ada peningkatan kasus ISPA pada Juli-Agustus 2023, yaitu 10.685 kasus. Periode sama setahun lalu, hanya 9.021 kasus, atau meningkat 15 persen. Sebagai bentuk mitigasi dan pencegahan, Ika menyarankan masyarakat mengenakan masker dan memantau indeks kualitas udara terkini ketika keluar rumah.

Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Sleman, Yonatan, mengatakan kenaikan kasus ISPA akibat pembakaran sampah masih perlu dikaji lebih dalam. Pasalnya, peningkatan kasus ISPA juga terjadi secara nasional.

"Ini nanti perlu kita cari tahu. Di mana sih faktor penyebab meningkatnya polutan sehingga indeks kualitas udara jadi mengkhawatirkan," ujar Yonatan, Senin (25/9/2023).

Tak hanya polusi udara



Tumpukan Sampah di Jembatan Winong, Jl Perintis Kemerdekaan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. Rabu (29/8/2023). Liputan6.com

Banyaknya “gunungan sampah” di berbagai sudut kota juga berpotensi menyebabkan persoalan kesehatan lainnya. Warga pinggir Sungai Code, Marpiyah bercerita saat Piyungan ditutup, tak ada lagi petugas yang mengambil sampah sehingga menumpuk dan mengundang lalat hijau.

"Waktu awal, lalat ijo itu banyak banget, masuk rumah, di kabel-kabel itu penuh lalat ijo," cerita Marpiyah.

“Gunungan sampah” yang banyak muncul di sudut-sudut kota, biasanya tak jauh dari depo sampah, di pinggir jalan, dan lahan kosong. Ika mengatakan tumpukan sampah bisa meningkatkan potensi penyakit akibat bakteri yang dibawa

oleh vektor seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Apalagi jika musim hujan tiba dan kondisi udara lembap.

"Penyakitnya bisa tipes, diare, dan leptospirosis. Jenis bakterinya banyak sekali, ada salmonella, shigella, dan staph. Kalau kontak langsung bisa menyebabkan penyakit kulit," jelas Ika.

Ia mengatakan untuk mencegah bencana kesehatan akibat sampah, masyarakat perlu tahu pentingnya memilah sampah organik dan anorganik. Jadi sampah yang dibuang hanya residu yang berjumlah sedikit dan tak perlu memba-kar sampah. Pemerintah perlu lebih gencar melakukan edukasi dan pendampingan agar masyarakat berubah per-ilakunya dan bisa menjaga lingkungan dan kesehatan.

"Jadi yang paling dasar adalah masyarakat diajari untuk mengolah sampah, diberi tahu apa dampaknya bagi keseha-tan. Kalau masyarakat paham tentu akan mendapat dukun-gan dari semua lapisan," ujar Ika.

Jogja Darurat Sampah: Hanyut Jauh Sampai Laut, Sampah Rusak Ekosistem

Anugerah Ayu Sendari



Dipublikasikan di Liputan6.com
pada tanggal 01 November 2023



Ayu Sendari/ Liputan6.com

Angin sore musim kemarau berembus kencang di Pantai Baros, Bantul, Yogyakarta. Tak jauh dari mulut muara Sungai Opak, Baros adalah wilayah konservasi mangrove di pantai selatan Yogyakarta. Di sela-sela akar napas tumbuhan bakau yang rimbun, terselip sampah-sampah plastik yang mulai memudar warnanya.

Bagi Setyo, pengelola destinasi wisata mangrove di Baros, ini bukan hal baru. Ia harus putar otak bagaimana cara mengangkut sampah yang sudah terlanjur bercampur lumpur di tempat tumbuhnya bakau.

Sampah-sampah plastik menyebar di habitat bakau. Beberapa minggu sebelumnya, wilayah ini tergenang air laut karena tersumbatnya muara sungai. Alhasil, sampah yang terbawa arus sungai sampai ke habitat bakau. Ketika air surut, sampah pun tertinggal.

Celakanya, beberapa hari sebelum banjir, pria yang akrab dipanggil Tyok itu bersama sejumlah relawan sempat menanam bibit bakau di wilayah itu. Bibit-bibit bakau dipastikan sulit bertahan hidup akibat tergenang banjir dan patah karena terjangan sampah.

"Kendalanya itu genangan banjir, arus deras, dan sampah, kalau tertimpa sampah ukuran besar itu kan patah semuanya," ujarnya sambil menunjukkan bibit-bibit bakau yang tergenang, Sabtu (9//9/2023).

Dalam satu bulan, bibit bakau akan layu, kering, lalu mati. Tyok menjelaskan penanaman bakau di Baros bersifat tambal sulam. Jika ada yang mati, maka akan ditanami kembali. Jika masalah sampah di hulu tidak ditangani secara serius, penanaman bakau tidak bisa maksimal.

"Nanam 100 hidup 30 itu udah bagus," ujarnya.

Sampah menjadi masalah utama konservasi mangrove di Baros karena sulit diangkat dan akhirnya tertimbun lumpur dan pasir. Menurut Tyok, sampah yang paling sering ditemukan adalah sampah plastik, styrofoam, dan kayu.

Sampah rusak ekosistem laut



Kawasan Konservasi Mangrove, Baros yang dipenuhi sampah. ©Anugerah Ayu/Liputan6.com

Sambil menyusuri lahan konservasi, Tyok menjejakkan kakinya di rerumputan. Bukan cuma tanah yang diinjak, melainkan tumpukan sampah yang sudah bercampur ranting, dedaunan, dan lumpur.

"Ini kira-kira (sampah) tebalnya bisa 1 meter sendiri ke bawah, jadi kita menginjak sampah, bukan tanah," katanya.

Walhi Yogyakarta melakukan brand audit and clean up di Pantai Baros pada Februari 2023, menemukan 1.527 sampah plastik yang bermerek dan tidak. Komposisi temuan itu, 72% adalah sampah plastik sekali pakai. Hasil brand audit menemukan sebagian besar sampah itu adalah kemasan dari produk dari perusahaan-perusahaan besar.

Pakar Geomorfologi Kelautan dan Pesisir, Fakultas Geografi, UGM, Bachtiar Wahyu Mutaqin menjelaskan sampah bisa menutupi akar-akar mangrove dan mengerdilkannya. Selain itu juga menghambat pertumbuhan mangrove yang baru ditanam.

"Tunas-tunas mangrove yang kecil-kecil itu nggak bisa tumbuh dengan baik. Jadi pilihannya bisa mati atau kerdil," ujarnya.

Padahal ekosistem mangrove memiliki kontribusi penting bagi lingkungan, masyarakat, dan ekosistem pantai. Ia menjadi benteng alamiah yang melindungi pantai dari abrasi, badai, dan gelombang pasang. Akar-akar yang kuat dan mencuat di atas permukaan tanah membantu menstabilkan tanah dan mengurangi erosi pantai.

Pohon mangrove juga mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar dalam akar dan tanah mereka. Ini membantu mengurangi jumlah karbon dioksida (CO₂) di atmosfer yang jadi salah satu gas yang menyebabkan pemanasan

global dan krisis iklim. Akar-akar mangrove dan vegetasi lainnya juga membantu menyaring air dari polutan dan sedimen sebelum mencapai lautan. Kualitas air yang masuk ke laut jadi lebih baik sehingga mengurangi polusi pada lingkungan laut.

Sampah harus dicegah agar tidak hanyut di sungai karena jika masuk ke habitat mangrove bisa merusak ekosistem. Mangrove tidak dapat berkembang dengan baik dan mengurangi kemampuannya melindungi garis pantai dari abrasi. Sedangkan sampah plastik yang terurai di ekosistem mangrove juga mencemari air dan tanah, serta mengurangi kualitas air dan lingkungan hidup bagi kehidupan berbagai organisme. Aneka hewan laut dan burung dapat terdampak negatif bila memakan sampah plastik. Sampah plastik yang rusak juga melepaskan mikroplastik ke laut luas sehingga bisa masuk ke tubuh hewan-hewan di laut dan berakhir di tubuh manusia jika kita mengonsumsinya.

Bersiap kiriman sampah



Calon bakau yang terendam banjir pada Agustus 2023, bakau dipastikan akan sulit tumbuh. ©Setyo/Wisata Mangrove Baros

Ditutupnya TPST Piyungan membuat Tyok harus bersiap dengan kemungkinan luapan sampah yang lebih banyak. Pasalnya, perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai belum hilang dan kemudian diperburuk dengan darurat sampah. Prediksinya, sampah akan meningkat pada musim penghujan.

"Kalau saat ini kondisi normal, suplai air dari atas (Sungai Opak) belum terasa. Tapi nanti kalau sudah satu minggu hujan, sampah datang sendiri dari atas," ujarnya.

Sebelum TPST Piyungan ditutup, kondisi sampah pantai selatan di Yogyakarta sudah memprihatinkan. Hasil penelitian dari Bachtiar yang berjudul "Geomorphological and

hydro-oceanographic analysis related to the characteristics of marine debris on the south coast of Yogyakarta, Indonesia”, menyebutkan kepadatan massa sampah plastik di Bantul meningkat sampai 364 persen sejak 2019 hingga 2022.

Asal sampah ini berasal dari perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan kemudian hanyut ke laut. Wujud sampahnya seperti botol, wadah makanan, busa makanan, kantong plastik, mainan, rokok, sandal, karpet, karet gelang, dan sarung tangan.

"Monitoring kami dari tahun ke tahun di Jogja, makin banyak sampah plastik. Tidak hanya di Bantul, tapi juga di Kulon Progo dan di Gunungkidul," tambahnya.

Meningkatnya jumlah penduduk dan pengelolaan sampah yang buruk membuat sungai jadi 'saluran' sampah menuju ke laut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana ekologis berkepanjangan. Selain terganggunya pertumbuhan mangrove, Bachtiar mengungkapkan ekosistem laut juga rusak seperti habitat penyu, terumbu karang, dan ikan.

"Pantai yang penuh sampah akan mengganggu proses pendaratan penyu. Kalau telur penyu sudah menetas, tukiknya yang kecil itu bisa mati terjerat sampah sebelum sampai ke laut," jelasnya.

Sampah juga mempengaruhi populasi ikan dan hewan laut lainnya. Sampah yang menutupi laut membuat sinar matahari sukar masuk untuk proses fotosintesis karang dan lamun. Padahal ini adalah ekosistem penting, untuk feeding ground (daerah pencarian makan), nursery ground (proses pembesaran), dan spawning ground (proses pengeluaran sel telur) untuk ikan.

Tyok sudah menyaksikan turunnya jumlah tangkapan ikan. Kini nelayan atau pemancing cukup sulit mendapat ikan dengan bobot lebih dari 1 kilogram. Jenis ikan tertentu seperti sidat juga mulai jarang ditemui.

"Jenis sidat itu hampir ada 24, sekarang kalau mau sehari mancing atau semalam gak bakal dapat," ujarnya.

Bachtiar menambahkan, sampah plastik yang terurai di laut akan membentuk mikroplastik. Jika termakan oleh ikan yang kemudian ditangkap dan dikonsumsi manusia, maka mikroplastik akan masuk ke tubuh manusia dan berpotensi mengganggu kesehatan.

Sampah pengaruhi kehidupan masyarakat pesisir



Tyok menunjukkan anak-anak bakau yang baru ditanam, terkena terdampas sampah, Sabtu (9//9/2023). ©Anugerah Ayu/Liputan6.com

Kondisi pertanian dan tambak sekitar pesisir juga bisa terdampak. Tyok bercerita, saat banjir laut pada awal Agustus 2023 lalu, puluhan hektare lahan pertanian terdampak. Sampah-sampah yang ikut terbawa arus menutupi lahan pertanian dan menyulapnya seperti tempat pembuangan sampah dalam sekejap.

Dalam jangka panjang, pantai yang kotor juga bisa mengurangi minat masyarakat untuk mengunjunginya. Citra Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata juga menjadi buruk.

“Kira-kira maukah wisatawan berkunjung ke pantai yang banyak sampahnya?” tanya Bachtiar.

Ia menegaskan sampah adalah permasalahan struktural. Semua elemen harus bergerak mulai dari pemerintah sampai masyarakat.

"Tidak bisa diselesaikan dari individu saja. Pemerintah harus punya political will untuk menyelesaikan sampah ini," ujarnya.

Bachtiar melihat perlu ada peraturan pembatasan penggunaan plastik dan pemilahan sampah. Ini juga berlaku pada pelaku usaha wisata. Fasilitas daur ulang seperti reduce, reuse, recycle (3R) juga perlu dibentuk di tingkat terkecil seperti desa atau kelurahan. Kebijakan ini harus dibarengi dengan sosialisasi bahaya sampah di laut.

"Pemerintah daerah juga perlu mempunyai kebijakan khusus untuk memantau sampah di laut," tegasnya.

Jogja Darurat Sampah: Pemerintah dan Masyarakat Harus Ubah Perilaku

Anugerah Ayu Sendari



Dipublikasikan di Liputan6.com
pada tanggal 31 Oktober 2023



Yogyakarta Aryo (26), seorang warga Caturtunggal, Depok, Sleman sempat kebingungan kala petugas sampah berhenti mengangkut sampahnya pada akhir Juli 2023 lalu. Ia biasanya membuang satu drum besar sampah setiap harinya. Sampah tersebut berasal dari konsumsi keluarganya dan penghuni 6 kamar yang indekos di rumahnya.

"Dari RT/RW sudah ada info kalau pengambilan sampah akan dibatasi, warga diimbau mengolah sampah sendiri," ujar Aryo Rabu (27/9/2023).

Untuk mengatasi situasi darurat ini, ia berinisiatif memilah sampah keluarganya. Sampah anorganik dibersihkan dan diberikan ke pengepul. Sementara sampah organik ia urai sendiri.

Aryo menimbun sampah organik dengan tanah pada sebuah pot berdiameter 40 sentimeter. Ulat dan cacing dimasukkan ke pot untuk membantu proses penguraian.

Ia melakukan secara mandiri. Tak ada dampingan dari RT/RW atau pemerintah setempat. Dengan memilah dan mengolah sampah, Aryo dan keluarganya bisa mengurangi sampah yang akan dibuang.

"Dari RT/RW cuma mengimbau untuk mengolah sampah, tapi tidak memberi tahu bagaimana caranya," ujarnya.

Aryo menambahkan tak ada bank sampah di lingkungannya. Teknik pengolahan sampah yang ia lakukan berasal dari internet dan pengalaman ikut workshop.

"Tidak semua orang punya inisiatif seperti ini. Kalau yang tidak peduli, akhirnya buang sembarangan atau dibakar. Padahal sebenarnya ada banyak pilihan, cuma tidak terinformasikan," tambahnya.

Pemerintah perlu bangun sistem



Pembuangan sampah di Depo Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta, Kamis (28/9/2023). ©Anugerah Ayu/Liputan6.com

Sekjen Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI), Yuningtyas Setyawati (Tyas) menyebutkan, persoalan sampah harus dituntaskan dari hulu. Ia mengatakan masyarakat masih memandang semua sampah harus dibuang. Perlu ada perubahan mindset masyarakat agar memilah dan mengolah sampah karena ada sampah yang masih bisa dimanfaatkan.

"Habit itu tidak bisa diubah dengan cepat, seperti membalik telapak tangan, tetapi butuh proses," ujar perempuan yang juga aktif di Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM. Para pemangku kepentingan perlu membangun sebuah sistem untuk mengubah mindset ini. Sistem juga harus

menyediakan fasilitas dan sarana pengelolaan sampah, mulai dari truk sampah hingga tempat pembuangan yang terpilah.

Tyas mencontohkan pembuangan dan pengolahan sampah di Jepang yang diangkut bergiliran berdasarkan jenis sampah. Jumlah sampah dibatasi per rumah, jika melebihi kuota, maka akan didenda.

"Nah pemerintah daerah perlu memikirkan sebuah sistem yang membuat masyarakat sadar bahwa mengelola sampah itu harus diawali dari rumah tangga masing-masing," ujarnya.

Pengelolaan sampah tanggung jawab siapa?



*Suasana TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta, Kamis (28/9/2023).
©Anugerah Ayu/Liputan6.com*

Menurut Undang-Undang Nomor 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam mengelola sampah. Masyarakat berperan mengurangi dan menangani sampah rumah tangga secara ramah lingkungan. Produsen harus mengelola kemasan dan barang yang tidak bisa terurai. Sedangkan pengelola kawasan pemukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, sosial dan lainnya wajib menyediakan fasilitas wadah, pengumpulan, dan pemilahan sampah.

Sementara pemerintah berperan memfasilitasi, mengembangkan, dan berupaya melakukan pengurangan sampah dari menyediakan fasilitas hingga teknologi. Pemerintah juga bertanggung jawab meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Mulai 23 Juli 2023, Pemerintah Daerah Provinsi DIY mengimbau kabupaten/kota untuk mengelola sampah secara mandiri. Sementara pemerintah provinsi bertanggung jawab mengelola TPA yang hanya menerima residu sampah saja.

“Sampah itu selalu dekat dengan kehidupan masyarakat. Semua kehidupan akan menghasilkan sampah. Sehingga paling efektif kalau sampah itu dikelola sedekat mungkin dengan sumbernya,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Kuncoro Cahyo Aji, Kamis (21/9/2023).

Ia menegaskan sampah tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah provinsi. Penanganan sampah harus diselesaikan mulai dari hulu, yaitu rumah tangga, kelurahan, lalu kabupaten/kota.

“Desa kami minta untuk mengeluarkan sampah dari dapur ke depan pintu secara terpisah pada setiap rumah tangga. Nanti kabupaten yang akan mengantar dari rumah tangga ke TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle),” ujarnya.

Kebijakan pengelolaan sampah di DIY tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perda ini memuat ketentuan pengurangan dan penanganan sampah dengan skema pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan daurulang sampah. Kuncoro menyebut, kabupaten dan kota seharusnya membuat turunan kebijakan dari perda ini.

Pemerintah harus beri fasilitas dan pendampingan



Pembuangan sampah di Depo Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta, Kamis (28/9/2023). ©Anugerah Ayu/Liputan6.com

Sugeng Darmanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan pemerintah kota sudah berupaya menerjemahkan kebijakan yang dibuat provinsi. Misalnya melalui pengurangan dan penanganan sampah melalui berbagai cara.

Di Kota Yogyakarta, pengelolaan sampah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan pembaruan dari Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012. Aturan ini secara garis besar mengatur pengelolaan sampah yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Ini juga termasuk pemberian insentif dan disinsentif pada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.

Sugeng menambahkan Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang gerakan zero sampah anorganik. Peraturan yang disosialisasikan awal 2023 itu untuk menekan volume sampah anorganik.

Gerakan zero sampah anorganik dilakukan dengan mengencarkan bank sampah yang ada di tingkat desa atau RW. Hingga September 2023, ada 658 bank sampah di Yogyakarta. Kabarnya, gerakan ini mampu menekan produksi sampah hingga 87 ton.

Pada masa darurat sampah, pemerintah kota juga membentuk gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja atau Mbah Dirjo. Gerakan ini mengajak masyarakat mengelola sampah organik melalui biopori, lubang yang dibuat di tanah untuk menyerap air hujan. Selain biopori, pengurangan sampah organik juga dilakukan dengan losida dan ember tumpuk. Mbah Dirjo dilakukan baik secara mandiri, di tingkat rumah tangga, atau secara komunal, dengan biopori jumbo.

Sugeng mengklaim, saat ini sudah ada 29.800 titik biopori yang tersebar di Kota Yogyakarta. Sementara target pada 2024 mendatang, biopori bisa mencapai 33 ribu titik. Pengelolaan sampah dengan biopori bisa menekan sampah sampai 60 ton.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan TPS3R di Nitikan. TPS3R ini nantinya akan menjadi tempat pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Dua gerakan ini menurut Sugeng sudah membantu menekan produksi sampah sampai 50 persen. Sementara untuk sisanya, pemerintah kota sedang mempertimbangkan pengelolaan sampah dengan teknik Refuse Derived Fuel (RDF).

“Kami sedang menjajaki sampah bisa dibawa ke satu pusat pengelolaan sampah dan dibuat menjadi RDF. Seperti membuat sekam, sampah dicacah kemudian dikeringkan dan hasilnya remah untuk pembakaran,” ujar Sugeng saat ditemui di kantornya pada Kamis (5/10/2023).

Sementara itu Tyas menjelaskan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah perlu dibarengi dengan pemenuhan fasilitas yang memadai. Dalam pemilahan sampah misalnya, perlu ada tempat yang layak agar masyarakat tak bingung menaruh sampah yang sudah dipilah.

“Langkah yang harus dilakukan adalah memfasilitasi sarana-prasarana untuk pemilahan sampah dan ada monitoring terhadap bank sampah,” jelas Tyas.

Ia melihat masih banyak bank sampah yang belum beroperasi maksimal baik karena minimnya fasilitas atau pendamp-

ingan. Akibatnya, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan atau membakarnya.

Agar darurat sampah tidak terjadi lagi, pemerintah juga harus banyak berbenah. Perubahan perilaku masyarakat soal sampah bisa berjalan jika pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dan tidak sekedar menyalahkan masyarakat saja.

Kedai Kopi Menjamur, Sampah Plastik Makin Menumpuk di Yogyakarta

M. Hasbi Kamil



Dipublikasikan di Mongabay
pada tanggal 21 Desember 2023



Mongabay

Suasana sore di satu kedai kopi di Seturan, Sleman, Yogyakarta, cukup bising saat Putri Inayah duduk dan mulai menyalakan laptop. Di luar kedai, langit mulai petang. Jalanan ramai dan sesekali terdengar bunyi klakson bersahutan.

Perempuan 20 tahun ini memesan es kopi susu kesukaannya sambil mengerjakan tugas kuliah. Pesanannya tersaji dalam gelas plastik, dengan sealer merek kedai kopi dan sedotan plastik. Sesaat setelah menancapkan sedotan dan mencicipi kopi, dia kembali mengalihkan perhatian ke laptop.

Setidaknya dalam satu minggu, dia minum dua sampai tiga gelas di kedai kopi. Biasa untuk mengerjakan tugas atau rapat organisasi.

Namun kebiasaan rutin ini sering membuatnya resah. Pasalnya, pesanan selalu datang dengan bahan plastik sekali pakai. “Ini pesan satu es kopi susu aja udah dapat tiga jenis plastik,” kata Putri, sembari menunjuk gelas plastik, sedotan plastik, dan pembungkus sedotan juga plastik. Biasanya dia membawa sedotan stainless steel sendiri. Kali ini dia lupa.

Keresahan Putri beralasan. Isu sampah sudah menjadi permasalahan sejak lama yang belum ada solusinya. Pada 23 Juli-5 September 2023 puncaknya saat TPA Piyungan ditutup selama 45 hari. Penutupan ini pun berdasarkan Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani Sekretaris Daerah DIY, Benny Suharsono.

Alasannya, TPA Piyungan sudah melebihi kapasitas tampung. Beberapa depo pembuangan sampah sementara di

kabupaten dan kota pun turut ditutup. Sampah di kos Putri juga menumpuk karena tak ada jadwal pengangkutan sampah.



Tumpukan sampah di pinggir Jalan Kusbini, sekitar 150 meter di barat kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Setelah TPA Piyungan ditutup, tumpukan sampah banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan di wilayah Yogyakarta. ©M. Hasbi Kamil/Mongabay Indonesia

Beban sampah plastik tak terkelola

Tumpukan sampah di sudut-sudut Kota Yogyakarta saat TPA Piyungan ditutup. Masa itu, tidak hanya rumah tangga yang resah, para pemilik kedai kopi pun resah.

Apalagi saat jadwal pengangkutan sampah terhenti, tetapi pengunjung di kedai kopi terus datang dan terus menghasilkan tumpukan sampah.

Abdan Syakuron, pemilik kedai kopi Botanica di Dusun Mrican, Kecamatan Depok, Sleman menyampaikan cerita serupa. Dia kelimpungan menangani sampah sejak TPA Piyungan ditutup. “Waktu itu udah numpuk parah sampahnya,” katanya.

Bahkan sampah organik dan anorganik di kedai kopi yang menumpuk selama sehari-hari itu mengeluarkan bau tak sedap. Karena tak tahan, dia membayar jasa pengangkut sampah swasta dengan harga lebih tinggi dari biasa. “Sekitar Rp150.000 untuk dua kali angkut, biasanya hanya Rp100.000 untuk empat kali angkut,” cerita Abdan.

Berdasarkan penelitian (2021), penyebaran kedai kopi di Yogyakarta didukung dengan banyaknya pelajar dan mahasiswa yang tergolong dalam usia produktif. Dalam angka, jumlah kedai kopi pun bertambah signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 ada 350 kedai, selanjutnya terus bertambah pada 2015 (600), 2018 (1.100) dan 2019 (3.500).

Mongabay juga melakukan penelusuran melalui data scraper Google Maps jumlah kedai kopi di Kecamatan Pakualaman. Mongabay gunakan kata kunci coffe shop dan kedai kopi di Kecamatan Pakualaman, kemudian membersihkan data dengan menyesuaikan ketepatan kecamatan. Kecamatan ini merupakan paling kecil di Kota Yogyakarta, seluas 0,63 km² dari total 35,2 km². Hasilnya, ada 35 kedai kopi di kecamatan itu.

ingkatan industri kopi konsumsi kopi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Data Kementerian Koordinator Bidang Per-ekonomian menyebutkan, industri kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan 250% dalam 10 tahun terakhir. Bahkan Indonesia menduduki peringkat kelima untuk konsumsi kopi tertinggi di dunia atau 5 juta kantong berukuran 60 kilogram pada periode 2020-2021.

Momok sampah plastik

Peningkatan kedai kopi di Yogyakarta tak selalu membawa kabar baik. Menjamurnya kedai kopi ini diikuti dengan penggunaan sampah plastik sekali pakai di Yogyakarta. Mulai dari gelas, seal gelas, sedotan, kantong bahkan alat makan.

Penggunaan sampah sekali pakai ini tak hanya untuk pemesanan take away, juga untuk dine in.

Renggo mengatakan, berdasarkan data komunitas lebih dari separuh kedai kopi di Yogyakarta masih menggunakan kemasan minum plastik sekali pakai untuk menyajikan menu mereka.

“Terutama kedai yang berbasis es kopi susu, itu besar banget produksi sampah plastiknya. Mereka bahkan tidak punya gelas, karena semuanya pakai [gelas] plastik,” ujar Renggo saat ditemui di Kedai Dongeng Kopi, miliknya.



Monster Plastik dari Kedai Kopi Waralaba



Unit eksternal:
Rp 9.500.000 (Rp 11.000.000 termasuk instalasi)



Unit eksternal:
Rp 10.000.000 (Rp 11.000.000 termasuk instalasi)

Ditujukan untuk kurang lebih 34 kedai kopi waralaba terbesar

Foto: [Kaskas Plastik](#)
 Daftar ke: [Kaskas Plastik](#)



Sampah dari satu gelas es kopi kamu!

Satu sampah cup kopi

Sementara itu, di kedai kopi waralaba, tempat Putri mengerjakan tugas, sampah plastik yang ditinggalkan Putri tak lenyap begitu saja. Setelah kedai tutup, sampah akan bercampur mulai dari gelas plastik, tisu, masker, bungkus dan puntung rokok, sampah kertas, juga yang lainnya. Setidaknya ada dua kantong sampah hitam besar dalam satu hari.

Berbeda dengan kedai Botanica milik Abdan, kedai ini akan memilah sampah dan gelas plastik yang sudah dipakai. Gelas plastik nantinya akan didaur ulang oleh rekannya sebagai wadah pembibitan tanaman hias.

Namun, sampah plastik lain seperti sedotan plastik, kantong plastik dan yang lainnya tetap dibuang.

Sampah-sampah kedai kopi biasanya diambil, diangkut ke depo, sebelum berakhir di TPA Piyungan. TPA Regional Piyungan merupakan tempat pembuangan sampah bagi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Pada 2022 rata-rata sampah yang masuk ke TPA Piyungan sebesar 741 ton per hari. Data DLHK DIY mencatat sekira 134 ton (18,1%) di antaranya adalah sampah plastik. Sedangkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat sektor perniagaan (restoran, kafe dan warung) menempati peringkat kedua sebagai penghasil sampah terbanyak, sebesar 28% di Provinsi DIY.



TPS Piyungan, Yogyakarta sudah kelebihan kapasitas tampungan sejak 10 tahun yang lalu. Tapi hingga saat ini tidak ada solusi terkait masalah sampah. Saat tutup, truk-truk pengangkut sampah pun parkir di depo penampungan. ©Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia

Penting intervensi kebijakan

Di TPA Piyungan, semua jenis sampah ditimbun jadi satu membawa dampak yang serius. Keberadaan sampah plastik turut menghambat proses degradasi sampah organik yang menumpuk di gunung sampah.

“Sampah plastik di TPA (Piyungan) tidak akan terdegradasi sampai puluhan tahun. Campur dengan tanah, dengan daun, dengan sampah organik maupun anorganik yang lain, plastik itu akan tetap menjadi plastik,” ujar Maizer Said Nahdi, Guru Besar Bidang Ilmu Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Parahnya, saat sampah plas-

tik yang tidak terkelola di darat bisa berakhir di sungai dan laut.

Berdasarkan data Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), sebanyak 398 ribu ton sampah plastik berada di laut Indonesia pada 2022. Maizer mengatakan, sampah plastik di laut ini tentu mencemari ekosistem air serta meracuni dan bisa membunuh makhluk hidup di dalamnya.

Solusi terbaiknya, katanya adalah menghentikan produksi dan penggunaan plastik. “Kalau ada peraturan daerah, misal, semua cafe di Jogja dilarang menggunakan plastik, itu bisa. Tapi (kalau melanggar) ada sanksinya.”

Transformasi penggunaan sampah plastik sekali pakai tentu tidak mudah, tetapi bisa. Renggo yang sudah mengelola usaha kedai kopi lebih dari 10 tahun menilai, meninggalkan kemasan plastik bukan hal mustahil. Beberapa kedai kopi di Jogja bahkan telah menolak pemesanan take away kecuali pembeli membawa tumbler atau wadah sendiri.

Komunitas Kopi Nusantara, katanya mulai mengurangi penggunaan kemasan plastik dalam acara-acara komunitas. Namun untuk mengajak para pemilik kafe meninggalkan kemasan plastik, butuh kerjasama banyak pihak, terutama pemerintah.

Berdasarkan UU Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan sampah merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, salah satunya, memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Di sisi lain, pelaku usaha seharusnya menggunakan bahan produksi yang ramah lingkungan.

Hingga kini belum ada kebijakan yang tegas mengenai pembatasan plastik sekali pakai oleh kedai kopi di wilayah DIY.

Nur Kholis dari Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), menilai pemerintah perlu melakukan intervensi. “Kalau mau minta pengusaha agar tanggung jawab, sementara pengusaha logikanya ngejar untung, kan nggak ketemu.”

“Kecuali pemda mengeluarkan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, menurut saya harus mulai dilakukan.”

Kholis menilai pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah melanggar hak warga atas akses terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat ketika kondisi darurat sampah terus terjadi di Yogyakarta.

Maizer sepakat penanganan sampah plastik bisa diatasi dengan partisipasi semua pihak, pemerintah, produsen, pelaku usaha, dan masyarakat. Dia mengingatkan, pencemaran plastik merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Efisiensi penggunaan plastik dan keter-

jangkauan harga plastik, nyatanya tidak sebanding dengan dampak yang terjadi pada lingkungan.

“Plastik itu kan relatif murah. Pelaku usaha tidak merasa dirugikan. Tapi sebetulnya yang dirugikan adalah alam. Bumi ini yang dirugikan.”

Kisah Pak Kas, Pengambil Sampah dalam Pusaran Sengkarut Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta

Ade Dani



Dipublikasikan di PortalYogya.com
pada tanggal 06 Maret 2024



Ade Dani/PortalYogya.com

Pak Kas adalah seorang penyedia jasa pengambilan sampah di Kota Yogyakarta. Melihat dinamika kehidupannya adalah 'jendela' untuk melihat secuil silang sengkarut pengaturan sampah di Kota Yogyakarta.

Pada suatu pagi yang dingin dan basah, hujan gerimis mengguyur Kota Yogyakarta yang masih dipeluk gelap.

Orang-orang masih tidur nyenyak dan ayam jantan belum berkokok, tetapi Pak Kas (58) dan Amir (25), anak sulungnya mulai 'blusukan' di kampung Langenastran Lor sejak pukul 03.00, Selasa 16 Januari 2024.

Bapak dan anak itu keluar – masuk gang untuk mengambil sampah, door to door dari setiap rumah langganannya.

Amir ada di belakang kemudi sedangkan Pak Kas berjalan mengambil sampah yang sudah disiapkan di depan rumah dan melemparkannya ke 'bak' belakang motor angkutan beroda tiga yang mereka bawa.

Pak Kas adalah seorang pengambil sampah dalam wilayah kerja di Kampung Musikanan, Jalan Kemitbumen, Jalan Suryoputran, Jalan Wijilan, dan Mangunegaran di Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta.

Ia sudah bergaul dengan sampah selama 30 tahun dan kini pelanggannya ada sekira 150, terdiri dari rumah tangga, sekolah, kantor, dan rumah makan.

Ia bekerja dari jam 03.00 pagi hingga 12.00 siang. Setelah itu ia istirahat dan angkutan roda tiga berkapasitas 700 kg diparkir di Jalan Madyosuro.

Pukul 15.00, ia mengambil sampah lagi hingga 17.00 sore kemudian pulang ke rumahnya di Desa Sidomoyo, Godean, Kabupaten Sleman.

Esoknya, sekira pukul 03.00, Pak Kas akan menyerahkan sampahnya ke sebuah truk pengangkut sampah 'swasta' yang menanti di Jalan Katamso, tepatnya di depan bekas Taman Hiburan Rakyat (THR) Purawisata, tak jauh dari tempat pembuangan sementara (TPS) yang ada di sana.

“Saya harus bayar Rp 200 ribu kepada sopir truk, setiap kali buang sampah,” ujarnya.

Pak Kas mengeluarkan ongkos ini sejak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami 'darurat sampah' karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sudah penuh dan ditutup sejak 23 Juli 2023.



*Kondisi TPS di Pengok tak mampu menampung sampah dari warga. Para tukang sampah juga tak bisa membuang sampahnya, 3 Februari 2024.
©Ade Dani/PortalYogya.com*

Akibatnya, warga Kota Yogyakarta dan pengambil sampah seperti Pak Kas tidak bisa membuang sampah di TPS karena ditutup atau dijadwal, hanya buka pada jam dan hari tertentu.

Di TPS – TPS yang masih buka, seperti di Jalan Pengok dan di dekat Stadion Mandala Krida, sampah tampak menggunung dan ada yang “meluber” ke bahu jalan.

Jangan ditanya baunya karena sampah itu tidak dipilah dan sudah beberapa hari tidak bisa dibuang ke TPA Piyungan.

Karena tidak ada pilihan lain, warga membuang sampahnya yang dibungkus tas kresek ke pinggiran jalan. Lagi – lagi,

bau tak sedap muncul dari sampah organik yang membusuk dan menjadi aroma khas di kota tujuan pariwisata ini. Dalam situasi darurat sampah, warga juga belum memilah sampahnya.

Sedangkan pekerjaan Pak Kas terganggu karena ia tidak bisa membuang sampah dari warga ke TPS di depan Purawisata, tetapi ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempatan ini. Ada jasa pengangkutan sampah 'mobile' dengan menggunakan truk.

Kehadiran truk pengangkut sampah ini menyelamatkan bisnis Pak Kas. Namun ia terpaksa harus menaikkan jasa pengambilan sampah dari para pelanggannya.

Baca Juga: Mengenal Mbah Atmo, Perajin Mainan Tradisional Anak di Jogja yang Masih Eksis.

Seorang pengurus PKK di Kampung Musikanan, Ermaniza (61) sebelum 'darurat sampah', mengatakan pihak kampung membayar Pak Kas sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

Namun setelah darurat sampah, warga yang masih ingin menggunakan jasanya diminta membayar kepada Pak Kas antara Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per bulan.



TPS depan Purawisata, tumpukan sampah pun menggunung. Mural bahasa visual dan bertuliskan Gerakan Zero Sampah Anorganik, “Pilah Sampah Seko Omah Biar Menjadi Berkah” yang mengajak masyarakat agar memilah sampahnya ©Dok. Ade Dani/PortalYogya.com

Pak Kas mengatakan untuk sekolah, kantor dan rumah makan, ongkosnya naik dari Rp 300.000 menjadi Rp 500.000. Total dalam sebulan, ia bisa memperoleh pendapatan kotor sekira Rp 12 juta, belum dikurangi dengan berbagai pengeluaran seperti membayar 'asisten' pemulung, membayar ongkos sopir truk sampah, bensin, dan lainnya.

Bapak dari tiga anak ini adalah orang yang ikut berjasa melancarkan pembuangan sampah dari masyarakat ketika tidak ada sistem yang baik soal pembuangan sampah. Sepertinya pemerintah belum melihat sampah sebagai bagian dari persoalan layanan publik yang penting di wilayah perkotaan.

Sebagai pemungut sampah, Pak Kas menyaksikan sebagian besar warga belum memilah sampahnya menjadi sampah organik dan anorganik. Namun ada yang sudah menjalankan seperti warga di RW 11 Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta.

Padahal para ahli sudah lama mengatakan sampah yang tidak dipilah menyebabkan TPA seperti Piyungan itu menjadi cepat penuh. Sampah dengan cepat akan menumpuk karena campuran sampah organik dan anorganik sulit didaur ulang.

Pemerintah sebenarnya punya mandat agar masyarakat memilah sampahnya. Hal ini diatur dalam UU No.18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk Kota Yogyakarta, ada Peraturan Walikota Yogyakarta No.67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Karena tidak serius untuk benar-benar memfasilitasi pemilahan sampah dari hulu hingga hilir, TPA Piyungan akhirnya cepat penuh. DLH Kota Yogyakarta hanya memberikan sosialisasi soal pemilahan sampah yang baru intensif menjelang penutupan TPA Piyungan.

Pak Kas mengatakan kalau ada komitmen masyarakat untuk memilah sampah, ia juga sepakat. 'Bak' di motor

angkutan roda tiganya akan dibagi dua, untuk sampah organik dan anorganik.

Hingga Maret 2023 ini, 'darurat sampah' masih terjadi di Kota Yogyakarta. TPS-TPS di Kota Yogyakarta masih penuh dengan tumpukan sampah dan warga masih membuang sampahnya di pinggir jalan.

Di TPS depan Purawisata, tumpukan sampah juga menggunung. Di situ ada mural yang mengajak masyarakat agar memilah sampahnya. Ada kalimat bertuliskan, Gerakan Zero Sampah Anorganik, “Pilah Sampah Seko Omah Biar Menjadi Berkah”.

Ajakan yang bagus, tetapi tanpa fasilitas memadai dan komitmen kuat dari pemerintah, sama saja seperti menjar-
ing angin. Buktinya, masyarakat masih juga belum memilah sampah dalam situasi darurat sampah ini.

Di TPS depan Purawisata itu, air lindi keluar dari tumpukan sampah yang tidak dipilah dan baunya menusuk hidung. Ironis, tapi inilah fakta soal sampah di Yogyakarta yang istimewa!

